

OMBUDSMAN JABAR MINTA PEMERINTAH ANTISIPASI KENAIKAN HARGA SEMBAKO JELANG LEBARAN

Senin, 08 April 2024 - jabar

Liputan6.com, Bandung - Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah antisipasi puncak kenaikan harga bahan pokok dan perbaikan teknis operasi pasar yang lebih nyaman menjelang Lebaran Idulfitri 2024 ini. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/4/2024), mengatakan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke pasar tradisional dan ritel modern di Kota Cirebon, Kabupten Purwakarta, dan Kota Bandung.

Kunjungan tersebut untuk melihat pelaksanaan program pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri.

Hasilnya, Ombudsman mendapatkan informasi, bahwa berdasarkan pengalaman sebelumnya, harga bahan pokok pada bulan Ramadhan ini akan terus naik dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 1-2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. "Selain peningkatan konsumsi masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri, peningkatan pembelian bahan pokok menjelang hari raya juga dilakukan dunia usaha dan rumah tangga sebagai persediaan mereka dalam mengantisipasi pasar yang biasanya libur beberapa waktu sebelum dan setelah hari raya," katanya.

Namun, sampai saat ini pedagang dan pembeli di pasar tradisional melihat ketersediaan bahan pokok relatif cukup. Hanya beberapa jenis sayuran yang ketersediaannya saat ini menjadi langka, sehingga harus dipasok dari daerah lain. Di sisi lain, Ombudsman juga melihat Pemerintah daerah pada saat ini telah melakukan pemantauan harga secara intensif dan melakukan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok.

Ombudsman Jawa Barat mendorong pemerintah daerah terus melakukan pemantauan dan memastikan program intervensi pasar untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga sampai hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Termasuk cepat merespon pengaduan yang diterima serta memantau keluhan masyarakat di berbagai media massa dan media sosial untuk segera diselesaikan.

"Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pelayanan operasi pasar yang tidak membuat masyarakat harus antri lama dan berdesak-desakan sebagai sering terjadi pada berbagai operasi pasar. Mungkin dapat dipertimbangkan agar pembelian bahan pokok tersebut dilakukan dibagi bergiliran berdasarkan jadwal atau wilayah domisili pembeli," katanya.